

RSU Tangsel Sediakan 3 Dokter Jiwa untuk Tangani Caleg Gagal

TANGSEL (IM)- Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menyediakan tiga dokter jiwa menjelang Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Direktur Utama RSU Tangsel, Umi Kusum menyebut tiga dokter ini bertugas memberikan konsultasi kepada calon legislatif (caleg) yang gagal menduduki kursi DPRD Tangsel. "Ada tiga orang dokter jiwa," ujar Umi pada Minggu (19/11).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat total ada 700 orang yang masuk dalam daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2024. Para calon anggota legislatif ini mewakili enam daerah pemilihan (dapil). Rinciannya adalah Dapil 1 Ciputat, Dapil 2 Pamulang, Dapil 3 Setu-Serpong, Dapil 4 Serpong Utara, Dapil 5 Pondok Aren, dan Dapil 6 Ciputat Timur.

Sementara itu, jumlah daftar pemilih tetap di Tangsel sebanyak 1.022.237 orang yang terdiri dari 501.755 laki-laki dan 520.482 perempuan. Lokasi pencoblosan tersebar di 3.824 tempat pemungutan suara (TPS).

Tidak hanya RSU Tangsel, RSUD Kabupaten Tangerang juga menyiapkan layanan konsultasi psikologi bagi para caleg yang gagal menjadi anggota dewan.

Kepala Humas Publikasi dan Informasi RSUD Kabupaten Tangerang, Hilwani mengatakan, fasilitas itu bisa membentengi mental psikologis caleg gagal, sehingga tidak mudah mengalami depresi.

"Kondisi ini dipersiapkan karena pada proses pemilihan legislatif kerap kali ditemui kasus caleg yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gagal dalam pesta demokrasi," katanya, Kamis (16/11).

Fasilitas konsultasi jiwa bagi caleg itu di antaranya dua dokter spesialis kejiwaan. Dengan begitu, ketika ada caleg yang mengalami gangguan kejiwaan akibat kalah dalam kontestasi Pemilu 2024 bisa langsung ditangani. ● pp

Prabowo Serahkan Hibah Sumur Bor dan PIPANISASI Air Bersih di Banten

LEBAK (IM)- Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto disambut warga saat tiba di acara peresmian penyerahan bantuan sumur bor dan pipanisasi Provinsi Jawa Barat- Provinsi Banten, di Desa Pemabulan, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, Jawa Barat, Minggu (19/11).

Prabowo tiba di lokasi pada pukul 10.30 WIB. Kehadirannya disambut antusias oleh warga setempat. Setibanya di lokasi, seluruh masyarakat menyoraki nama Prabowo. "Prabowo, Prabowo," sorak masyarakat diiringi tepuk tangan. Penyerahan bantuan sumur bor dan pipanisasi diberikan kepada 15 desa. Bantuan tersebut untuk menghadapi musim kemarau saat ini. Sejumlah pimpinan desa mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Prabowo menanggapi dengan satu pesan, yakni agar mereka menjaga hibah Kementerian agar dapat dirasakan manfaatnya. "Kita ingatkan semua unsur harus kerja sama yang baik untuk melayani masyarakat jangan lupa untuk dirawat perlengkapan tersebut, supaya dapat dirasakan manfaatnya dan dimanfaatkan lebih lama lagi," ujar Prabowo. ● pra



KEJURNAS PANAHAN 2023 DI KOTA BOGOR

Sejumlah atlet panahan putri membidik target sasaran saat bertanding dalam Kejurjas Panahan 2023 di Stadion Pajajaran, Kota Bogor, Jabar, Minggu (19/11). Pengurus Pusat Persatuan Panahan Indonesia menggelar Kejurjas Panahan 2023 yang merupakan ajang babak kualifikasi PON 2024 Aceh-Sumut, diikuti 585 atlet panahan dari 35 provinsi di Indonesia yang berlangsung hingga 24 November 2023.

Bupati Pandeglang Raih Lencana Bakti Pembangunan Daerah

PANDEGLANG (IM)- Bupati Pandeglang, Irna Narulita meraih penghargaan Lencana Bakti Pembangunan Daerah dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Penghargaan itu diberikan atas komitmen dan kerja keras Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dalam mendorong percepatan pembangunan desa yang ada di wilayah tersebut.

"Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemkab Pandeglang untuk membangun dan mengembangkan desanya untuk lebih maju lagi," ungkap Bupati Irna, Minggu (19/11).

Bupati Irna juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Menteri PDTT, yang telah menganugerahi Pemkab Pandeglang melalui lencana penghargaan ini.

"Terimakasih pak Menteri, ini jadi motivasi kami dan kami akan terus berjuang untuk kemajuan daerah dimulai dari desa," katanya.

Sementara, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar mengaku, penghargaan Lencana Bakti Pembangunan Daerah merupakan bentuk apresiasi kepada para Bupati yang telah mencapai status Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, dan Desa Tertinggal yang terentaskan.

"Penghargaan ini diseraikan sebagai apresiasi atas kerja keras dan komitmen dari daerah, dalam mendorong percepatan pembangunan desa, sehingga seluruh desa yang ada di Provinsi Banten, mencapai status berkembang, maju dan mandiri," ujarnya.

Pihaknya juga berharap, dengan adanya penghargaan ini, kiranya dapat menjadi semangat bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi, merancang program pembangunan dalam membangun desa yang mandiri dan berkembang lagi.

"Semoga ini menjadi semangat bagi Kepala Daerah di Banten untuk lebih memajukan lagi pembangunan daerahnya," tandasnya. ● pra



PEMBANGUNAN TPST GEDEBAGE

Pekerja menyelesaikan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Gedebage Bandung, Jabar, Minggu (19/11). Pemerintah Kota Bandung menargetkan, TPST Gedebage akan rampung pada akhir November 2023 guna mengurangi permasalahan sampah di Kota Bandung.

Bali Tolak Program Penyebaran 200 Juta Telur Nyamuk Wolbachia

Penolakan tersebut dilakukan karena pilot projects penyebaran telur nyamuk Wolbachia ini belum disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga terjadi banyak penolakan. Kalau banyak masyarakat yang menolak, maka program ini harus ditunda, kata Penjabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra.

DENPASAR (IM)- Pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya secara tegas menolak pilot projects penyebaran 200 juta telur nyamuk Wolbachia yang rencananya akan disebar di Kota Denpasar

dan Singaraja Bali.

Telur nyamuk Wolbachia disebar dengan tujuan menekan angka penularan kasus demam berdarah dengue (DBD) akibat gigitan nyamuk aedes aegypti. Namun sayangnya, Ma-

hendra Jaya tidak menjelaskan secara saintifik alasan penolakan tersebut. Dia hanya mengemukakan bahwa penolakan tersebut dilakukan karena pilot projects penyebaran telur nyamuk Wolbachia ini belum disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga terjadi banyak penolakan.

"Bali menolak dengan tegas. Sebab program ini belum disosialisasikan secara masif ke masyarakat luas," ujarnya Minggu (19/11).

Ia mengatakan, di Bali sendiri terjadi pro dan kontra. Di Bali banyak masyarakat yang menolak. Bila masyarakat banyak yang menolak, maka program ini harus ditunda.

"Kami tidak mau masyarakat Bali terbelah. Jadi perlu sosialisasi, masyarakat harus menerima. Kalau masyarakat Bali menolak maka ini harus ditunda. Kami tidak ingin masyarakat terbelah dan tidak kondusif," ujarnya.

Sekalipun tegas menolak, tetapi Mahendra Jaya tidak mengemukakan secara resmi kepada masyarakat luas. Hal ini karena dikhawatirkan adanya berbagai polemik dan bisa berdampak kepada pariwisata Bali.

Sebelum penolakan tersebut, banyak video penolakan berseliweran di berbagai platform media sosial. Salah satunya berasal dari Prof. Richard Clapoth yang mengatakan bahwa

telur nyamuk Wolbachia itu bagian dari rekayasa genetik yang secara teknologi berbahaya bagi keamanan nasional Indonesia.

Bahkan, ribuan telur nyamuk Wolbachia itu saat ini sudah berada di Lovina Bali. Saat dikonfirmasi ke pihak terkait, terutama Dinas Kesehatan Provinsi Bali, pihaknya mengaku tidak tahu menahu soal ini. Made Mahendra Jaya juga mengatakan tidak mengetahui soal keberadaan telur nyamuk Wolbachia di Lovina Bali.

Ia sudah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk mengeceknya. Namun setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan ribuan telur nyamuk Wolbachia tersebut. ● pra

Hasil Survei IPRC, Gen Z di Banten Suka dengan Politik Uang

SERANG (IM)- Gen Z di Banten masih mewajarkan para peserta Pemilu melakukan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan.

Data base 10,9 persen dari 1220 responden survei Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC), terdapat 44,7 persen gen Z suka dengan politik uang.

Direktur Operasional & Data IPRC, Tedy Nurzaman mengatakan, politik uang masih membayangi pesta demokrasi. Presentase penerimaan masyarakat terhadap politik uang masih tinggi.

Data ini bertolak belakang dengan 53,6 persen masyarakat yang ingin menghilangkan dinasti politik di Banten.

Sehingga perlu ada perubahan pola pandang.

"Praktik politik uang menjadi hal yang wajar. Hal ini menurut kami ada kontradiksi yang terjadi, karena suatu sisi masyarakat ingin menghilangkan dinasti politik tapi masih mewajarkan politik uang," katanya, Minggu (19/11).

Selain itu, ada 36,1 persen masyarakat menilai pencegahan dan pemberantasan korupsi sangat buruk di Banten. Dengan begitu, ada kerinduan masyarakat terhadap sosok pemimpin yang jujur, amanah dan antikorupsi.

"Kondisi pemberantasan korupsi paling buruk di Banten. Ada

kerinduan masyarakat terhadap pemimpin yang bebas korupsi," ungkapnya.

Sementara itu, Akademisi Ilmu Pemerintahan Untirta, Elly Nurliana menilai, masyarakat pragmatis akan melanggengkan dinasti politik di Banten.

"Masyarakat yang pragmatis karena para regenerasi dan aktor di dinasti politik uangnya banyak. Jadi ketika mendapatkan uang sesuatu hal yang wajar," terangnya.

Ia menjelaskan, politik uang tidak akan selesai ketika masyarakat masih membuka ruang. Apalagi gen Z menganggap politik uang masih wajar.

"Banyak gen Z masuk barisan dinasti politik

Ini sangat membahayakan demokrasi di Indonesia, khususnya di Banten," jelasnya.

Sehingga, dinasti politik akan tetap langgeng jika tidak ada pola pikir yang perubahan. Kesadaran gen Z terhadap bahaya politik uang menjadi kunci terkinisnya dinasti politik.

Menurutnya, dinasti politik yang membayangi pemerintahan di daerah Banten, faktor penyebabnya kekuatan kapital logistik.

"Di Banten ini dinasti politik sulit ya, tapi kalau masyarakat sadar, kalau money politics tinggi akan sulit," tegasnya. ● pra

Pemkab Bogor, Kemenag dan Pengadilan Agama Bahas Isbat Nikah Terpadu

BOGOR (IM)- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor serta Pengadilan Agama Cibinong, membahas program Isbat Nikah Terpadu kepada jajaran Kepala Desa se-Kabupaten Bogor, di Hotel Darmawan Park, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Kamis (16/11).

Hadir mewakili Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, Ketua Pengadilan Agama Cibinong, Kepala DP3AP2KB, dan perwakilan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor. Kegiatan diikuti jajaran Kepala

Desa se-Kabupaten Bogor.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan, fasilitasi isbat nikah merupakan wujud sinergi dan kolaborasi Pemkab Bogor bersama Kantor Kemenag Kabupaten Bogor dan Pengadilan Agama Cibinong untuk memberikan kepastian hukum atau legalitas pernikahan melalui akta nikah, agar hak-hak yang sah dari pasangan suami istri, terutama perempuan dan anak terlindungi.

"Program Isbat Nikah Terpadu ini adalah bukti Pemkab Bogor hadir untuk melindungi masyarakat di sektor rumah tangga. Dengan memfasilitasi masyarakat melalui program Isbat Nikah Terpadu ini, kita bukan hanya melaksanakan tugas wajib saja, tapi juga bisa menjadi amal ibadah kita nanti," kata

Burhanudin.

Dia mengingatkan jajaran kepala desa bahwa tugas utama pemerintah adalah membantu, memfasilitasi, mengurus masyarakat khususnya yang hidupnya kurang beruntung. Dan program Isbat Nikah Terpadu ini merupakan masukan dari para kepala desa yang kami tangkap dan kami tuangkan menjadi program kebijakan.

"Sosialisasi Isbat Nikah Terpadu penting, agar para stakeholder dapat mengetahui dengan persyaratan dan manfaat program Isbat Nikah Terpadu kemudian dapat menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat. Selesai kegiatan ini, kumpulkan RT dan RW di wilayah masing-masing, data warganya yang belum memiliki akta nikah," ungkap Sekda Burhanudin. ● gio



Pemkab Bogor, Kemenag, Pengadilan Agama, bahas program Isbat nikah terpadu.